Etika dan Akuntabilitas Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern: Sebuah Kajian Konseptual

Ahmad Difa Awlia Aslim[1], Nurul Ayuni[2]*
[1,2] Universitas Negeri Makassar
* E-mail Korespondensi: nurulayuni@unm.ac.id

Information Article
History Article
Submission: 11-10-2026
Revision: 20-11-2026
Published: 22-11-2026

DOI Article:
10.24905/mlt.v8i1.575

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan konseptual antara etika dan akuntabilitas publik serta merumuskan kerangka terpadu untuk memperkuat keduanya. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka naratif yang bersifat konseptual-analitis dengan analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika membentuk orientasi moral dari dalam, sedangkan akuntabilitas menyediakan pengawasan dan konsekuensi dari luar. Efektivitas keduanya bergantung pada kepemimpinan etis, budaya integritas, transparansi yang bermakna, perlindungan pelapor, dan partisipasi publik. Tantangan kontemporer mencakup masalah banyak tangan, ritualisasi pelaporan, dan opasitas algoritma. Kajian ini berimplikasi pada perlunya sistem integritas yang melampaui kepatuhan formal dan bernilai karena menyintesis literatur lintas bidang. Keterbatasannya ialah ketiadaan data empiris.

Kata Kunci: Etika Publik, Akuntabilitas, Integritas, Transparansi, Tata Kelola Pemerintahan

A B S T R A C T

This study aimed to explain the conceptual relationship between public ethics and accountability and to formulate an integrated framework for strengthening both. It used a narrative, conceptual-analytical literature review with thematic analysis. The review showed that ethics shapes moral orientation from within, while accountability provides oversight and consequences from outside. Their effectiveness depended on ethical leadership, a culture of integrity, meaningful transparency, whistleblower protection, and public participation. Contemporary challenges included the problem of many hands, ritualized reporting, and algorithmic opacity. The findings imply that integrity systems should go beyond formal compliance. The study is limited by the absence of empirical data.

Key word: *Public Ethics, Accountability, Integrity, Transparency, Governance*

Acknowledgment

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

PENDAHULUAN

Kepercayaan terhadap lembaga publik merupakan modal utama bagi pemerintahan yang efektif. Warga bersedia mematuhi aturan, membayar pajak, dan menerima kebijakan yang tidak selalu menguntungkan mereka apabila meyakini bahwa penyelenggara pemerintahan bertindak jujur, adil, dan dapat dimintai pertanggungjawaban . Sebaliknya, skandal penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan korupsi mengikis kepercayaan itu serta melemahkan legitimasi negara. Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency International (2025) menunjukkan bahwa persoalan integritas di sektor publik masih menjadi perhatian global dan tidak terbatas pada satu kawasan atau tingkat pembangunan tertentu.

Dalam kajian administrasi publik, upaya menjaga kepercayaan tersebut lazim dibahas melalui dua gagasan yang saling berkaitan, yaitu etika dan akuntabilitas. Etika publik berkaitan dengan nilai, norma, dan pertimbangan moral yang menuntun keputusan dan perilaku penyelenggara pemerintahan. Huberts (2018) memandang integritas sebagai tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma moral yang relevan, sehingga integritas tidak cukup dipahami sebagai ketiadaan pelanggaran hukum. Akuntabilitas, di sisi lain, merujuk pada hubungan ketika seorang aktor wajib menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada suatu forum, forum dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan penilaian, dan aktor dapat menghadapi konsekuensi (Bovens, 2007).

Pembedaan antara kepatuhan hukum dan perilaku etis penting dalam diskusi ini. Tindakan yang sah secara hukum belum tentu pantas secara moral, misalnya keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu dengan memanfaatkan celah aturan. Sebaliknya, akuntabilitas yang hanya berfokus pada pemenuhan prosedur dapat menghasilkan ketaatan formal tanpa mengubah pertimbangan moral pelakunya. Kedua kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa etika dan akuntabilitas perlu dipikirkan bersama, bukan sebagai dua agenda reformasi yang berjalan sendiri-sendiri (Mustafa et al., 2026).

Meskipun kedua gagasan itu sering disebut bersamaan, hubungan di antara keduanya jarang dibahas secara terpadu. Literatur akuntabilitas berkembang pesat dan konsepnya terus meluas hingga mencakup responsivitas, transparansi, dan kinerja (Mulgan, 2000). Perluasan ini membuat akuntabilitas mudah dipakai sebagai slogan tetapi sulit dioperasionalkan. Pada saat yang sama, telaah atas penelitian akuntabilitas menunjukkan bahwa asumsi tentang agen yang cenderung menyimpang tidak selalu sesuai dengan praktik. Kegagalan akuntabilitas dapat pula bersumber dari forum yang kurang berminat atau kurang mampu menagih

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

pertanggungjawaban, yang disebut forum drift (Schillemans & Busuioc, 2015). Sementara itu, literatur etika dan integritas, yang banyak membahas kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi pelayanan publik, sering berjalan terpisah dari perdebatan tersebut (Shakeel & Van Thiel, 2020; Lee dkk., 2024).

Tantangan kontemporer menambah kerumitan persoalan. Digitalisasi layanan publik, pemanfaatan data besar, dan penggunaan sistem berbasis kecerdasan buatan memindahkan sebagian pertimbangan keputusan ke dalam sistem teknis yang sulit dijelaskan (Aslim, Amalya, et al., 2026). Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru tentang siapa yang harus menjawab ketika keputusan algoritmik merugikan warga (Busuioc, 2021). Struktur pemerintahan yang kolaboratif dan terfragmentasi juga memperumit penentuan tanggung jawab, yang oleh Thompson (1980) disebut masalah banyak tangan (*the problem of many hands*).

Organisasi internasional menekankan hal serupa. Rekomendasi OECD (2017) tentang integritas publik, misalnya, tidak hanya meminta negara memperkuat aturan dan lembaga pengawas, tetapi juga membangun budaya integritas di seluruh masyarakat dan memastikan akuntabilitas yang efektif. Pendekatan tersebut mengisyaratkan bahwa sistem integritas yang kuat memerlukan kombinasi perangkat formal dan nilai yang dihayati, bukan salah satunya saja.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang mempertemukan literatur etika dan akuntabilitas dalam satu kerangka konseptual yang bersifat umum dan dapat diterapkan lintas konteks pemerintahan. Tujuan artikel ini ada tiga: (1) menjelaskan hubungan konseptual antara etika dan akuntabilitas publik; (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan tantangan kontemporer yang memengaruhi keduanya; dan (3) merumuskan kerangka terpadu beserta implikasi praktisnya. Artikel ini berkontribusi secara akademik melalui sintesis yang menghubungkan akuntabilitas, integritas, dan tata kelola digital, serta secara praktis melalui pemetaan strategi penguatan pada tingkat individu, organisasi, dan sistem.

Kajian ini sengaja tidak membatasi diri pada satu negara, daerah, atau jenis lembaga. Prinsip etika dan akuntabilitas bersifat lintas konteks, sedangkan praktik pelaksanaannya beragam. Dengan pendekatan yang umum, pembaca dari berbagai konteks pemerintahan dapat menyesuaikan temuan dengan kondisi masing-masing.

Artikel disusun sebagai berikut. Bagian metode menjelaskan pendekatan kajian pustaka

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

yang digunakan. Bagian hasil dan pembahasan menguraikan konsep, tipe, faktor pendukung, tantangan, dan kerangka terpadu. Bagian simpulan memuat jawaban atas tujuan kajian serta saran bagi pembuat kebijakan, pimpinan organisasi, dan peneliti.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka naratif (*narrative literature review*) yang bersifat konseptual-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan artikel adalah membangun pemahaman konseptual dan kerangka, bukan menguji hipotesis atau mengestimasi besaran pengaruh. Rancangan semacam ini lazim digunakan dalam penelitian administrasi publik ketika konsep yang dikaji tersebar di banyak sumber dan disiplin, seperti ilmu administrasi, etika, psikologi organisasi, dan studi tata kelola.

Sumber data berupa artikel jurnal bereputasi di bidang administrasi publik, etika, dan perilaku organisasi, buku rujukan, serta dokumen kebijakan organisasi internasional. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan empat kriteria. Pertama, relevansi dengan etika, integritas, atau akuntabilitas di sektor publik. Kedua, kontribusi konseptual atau sintesis, misalnya tinjauan sistematis dan kerangka teoretis. Ketiga, kebaruan, dengan prioritas pada publikasi sepuluh tahun terakhir, sedangkan karya klasik dipertahankan apabila menjadi rujukan konsep dasar. Keempat, cakupan lintas konteks, sehingga kajian tidak bertumpu pada satu negara atau daerah.

Ruang lingkup konsep dibatasi pada empat istilah kunci agar analisis tetap terarah. Etika publik dipahami sebagai nilai dan norma moral yang menuntun perilaku penyelenggara pemerintahan, sedangkan integritas dipahami sebagai kesesuaian tindakan dengan nilai dan norma tersebut (Huberts, 2018). Akuntabilitas dipahami sebagai hubungan antara aktor dan forum yang mencakup kewajiban memberi informasi dan penjelasan, kesempatan bagi forum untuk menilai, serta kemungkinan konsekuensi (Bovens, 2007). Transparansi dipahami sebagai ketersediaan informasi tentang kegiatan dan keputusan pemerintah bagi pihak di luar organisasi. Batasan ini digunakan secara konsisten pada seluruh tahap analisis.

Analisis dilakukan secara tematik melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah identifikasi dan pemetaan konsep inti, yaitu etika, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan pelaporan pelanggaran. Tahap kedua adalah sintesis lintas sumber untuk menemukan titik temu, perbedaan, dan celah. Tahap ketiga adalah penyusunan kerangka terpadu dan implikasi praktis. Konsistensi interpretasi dijaga dengan merujuk definisi konsep pada sumber aslinya dan

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

membandingkan temuan antarsumber. Kajian ini tidak dimaksudkan sebagai tinjauan sistematis sehingga temuannya bersifat konseptual dan perlu diuji secara empiris pada penelitian lanjutan.

Untuk menjaga kredibilitas kajian, beberapa langkah diterapkan. Sumber yang telah melalui telaah sejawat diprioritaskan. Ringkasan dan tujuan setiap sumber dibaca untuk memastikan klaim yang disampaikan tidak melebihi bukti yang disajikan penulis aslinya. Temuan sumber dibedakan secara eksplisit dari interpretasi penulis artikel ini, khususnya pada bagian kerangka terpadu. Keterbatasan pendekatan dinyatakan secara terbuka pada bagian pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Konseptual Etika dan Akuntabilitas

Hasil sintesis menunjukkan bahwa etika dan akuntabilitas bekerja melalui jalur yang berbeda tetapi saling melengkapi. Etika publik bekerja dari dalam melalui internalisasi nilai, sedangkan akuntabilitas bekerja dari luar melalui pengawasan, penilaian, dan konsekuensi. Keduanya diperlukan karena aturan tidak dapat mengantisipasi semua situasi yang dihadapi penyelenggara pemerintahan. Ruang diskresi yang tidak terhindarkan dalam pelayanan publik hanya dapat diisi secara bertanggung jawab apabila pejabat memiliki orientasi moral yang kuat. Sebaliknya, nilai yang tidak disertai pengawasan rentan terhadap rasionalisasi, konflik kepentingan, dan tekanan situasional.

Jembatan antara kedua sisi tersebut dapat ditemukan pada gagasan *felt accountability*. Overman dan Schillemans (2022) menjelaskan bahwa mekanisme akuntabilitas hanya berfungsi dengan baik apabila individu percaya bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Dengan demikian, akuntabilitas tidak semata-mata soal tersedianya prosedur pelaporan, tetapi juga soal bagaimana prosedur itu dihayati oleh pelaku. Penghayatan inilah yang menghubungkan mekanisme eksternal dengan pertimbangan moral internal.

Bukti dari penelitian perilaku mendukung pandangan tersebut. Aleksovska dkk. (2019) menelaah 266 eksperimen yang dimuat dalam 211 artikel dan menemukan banyak efek positif akuntabilitas terhadap pengambilan keputusan dan perilaku individu. Namun, mereka juga mencatat bahwa temuan eksperimen tidak selalu dapat diterjemahkan langsung ke dalam konteks administrasi publik. Implikasinya, rancangan mekanisme akuntabilitas, termasuk siapa

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

yang menagih, seberapa legitim penagih itu, dan apa yang ditagihkan, sama pentingnya dengan keberadaan mekanisme itu sendiri.

Dimensi dan Tipe Akuntabilitas Publik

Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dan forum. Aktor memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan penjelasan, forum dapat mengajukan pertanyaan dan menilai, dan aktor dapat menghadapi konsekuensi. Definisi relasional ini memperjelas bahwa akuntabilitas selalu menyangkut tiga hal, yaitu penyediaan informasi, ruang diskusi, dan kemungkinan sanksi atau ganjaran. Tanpa unsur konsekuensi, hubungan tersebut cenderung berhenti pada pelaporan administratif. Bovens juga membedakan akuntabilitas menurut forum yang menagih, yakni politik, hukum, administratif, profesional, dan sosial, serta menurut aspek yang dipertanggungjawabkan, yakni keuangan, prosedur, dan hasil (Aslim, Ayuni, et al., 2026).

Dari sudut pandang sumber kendali, Romzek dan Dubnick (1987) membedakan empat tipe akuntabilitas, yaitu hierarkis (birokratik), hukum, profesional, dan politik. Mereka memakai kasus tragedi pesawat ulang-alik *Challenger* untuk menunjukkan bahwa tuntutan akuntabilitas yang saling bertentangan dapat membentuk keputusan penting. Tabel 1 merangkum keempat tipe tersebut beserta contoh mekanismenya.

Tabel 1. Tipe Akuntabilitas Publik dan Karakteristiknya

Tipe	Sumber kendali	Forum penagih	Contoh mekanisme
Hierarkis (birokratik)	Internal	Atasan dan unit pengawas internal	Laporan kinerja berjenjang, audit internal, evaluasi atasan
Hukum	Eksternal	Pengadilan dan lembaga penegak hukum	Peninjauan yudisial, audit kepatuhan, penegakan sanksi administratif atau pidana
Profesional	Internal	Sesama profesi dan organisasi profesi	Kode etik, komite etik, standar dan sertifikasi profesi, tinjauan sejawat
Politik	Eksternal	Lembaga perwakilan, warga, dan pemangku kepentingan	Dengar pendapat, pelaporan kepada legislatif, pemilihan umum, konsultasi publik

Sumber: Diolah dari Romzek dan Dubnick (1987) serta Bovens (2007)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa tidak ada satu tipe pun yang memadai untuk berdiri sendiri. Akuntabilitas hierarkis menjamin kepatuhan terhadap atasan tetapi dapat menekan suara profesional. Akuntabilitas hukum memberi kepastian tetapi bersifat reaktif dan hanya

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

menjangkau pelanggaran yang dapat dibuktikan. Akuntabilitas profesional menghargai keahlian tetapi bergantung pada kejujuran komunitas profesi itu sendiri. Akuntabilitas politik menjamin legitimasi demokratis tetapi sering terbatas pada isu yang menarik perhatian publik. Karena itu, sistem yang sehat memadukan keempat tipe dan mengelola benturan di antaranya secara sadar. Benturan tersebut, misalnya antara perintah atasan dan pertimbangan profesional, merupakan sumber dilema etis yang paling sering dihadapi pejabat publik.

Perluasan makna akuntabilitas juga perlu dicermati. Mulgan (2000) mengingatkan bahwa konsep ini terus meluas hingga mencakup berbagai hal yang tidak selalu berkaitan dengan penagihan pertanggungjawaban, seperti responsivitas dan dialog. Inti akuntabilitas, menurut penelusurannya, bersifat eksternal, melibatkan tuntutan untuk menjelaskan, dan memungkinkan sanksi. Perluasan yang tidak terkendali berisiko mengaburkan inti tersebut sehingga akuntabilitas berubah menjadi label bagi semua hal yang dianggap baik dalam tata kelola.

Etika Individu, Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi

Dari sisi etika, kajian terhadap literatur menunjukkan bahwa perilaku etis tidak semata-mata ditentukan oleh karakter individu. Huberts (2018) menegaskan bahwa integritas memiliki beberapa makna yang saling berkaitan dan penting bagi kepercayaan publik. Pemahaman yang dangkal, misalnya mereduksi integritas menjadi kepatuhan pada aturan, berisiko menghasilkan sistem yang rapi di atas kertas tetapi tidak mengubah perilaku. Oleh karena itu, kajian integritas perlu memperhatikan konteks organisasi tempat keputusan diambil.

Kepemimpinan etis sering dipandang sebagai kunci pembentukan konteks itu. Shakeel dan Van Thiel (2020) meninjau 45 artikel dan menemukan bahwa konsep kepemimpinan etis masih diukur dengan beberapa instrumen yang berbeda. Temuan mereka tentang sektor publik juga beragam: kepemimpinan etis dikaitkan dengan dampak positif, tetapi juga dengan konsekuensi negatif. Hasil yang campuran ini menunjukkan bahwa kepemimpinan etis bukan solusi tunggal dan efeknya bergantung pada bagaimana ia dirumuskan, diukur, dan dijalankan. Pimpinan yang menetapkan teladan tetapi tidak menyediakan mekanisme pelaporan dan koreksi yang aman belum cukup untuk membangun budaya integritas.

Motivasi pelayanan publik (*public service motivation*) sering diharapkan menjadi sumber perilaku etis. Lee dkk. (2024) menelaah 59 artikel mengenai kaitan motivasi pelayanan publik dengan hasil etis dan menyimpulkan bahwa bukti empirisnya terus bertambah, tetapi

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

mekanisme yang menjelaskan pengaruhnya belum jelas. Artinya, motivasi pelayanan publik tidak dapat dianggap otomatis menjamin perilaku etis. Motivasi tersebut perlu ditopang oleh rekrutmen berbasis nilai, pelatihan berbasis dilema, dan lingkungan kerja yang menghargai keberanian moral.

Pada tingkat organisasi, masalah banyak tangan yang dirumuskan Thompson (1980) menegaskan perlunya rancangan tanggung jawab yang jelas. Dalam organisasi besar, hasil kebijakan merupakan produk kontribusi banyak orang sehingga tidak mudah menunjuk siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerugian. Kondisi ini membuka celah bagi saling melempar tanggung jawab. Organisasi yang serius membangun etika dan akuntabilitas karenanya perlu memetakan pemilik keputusan pada setiap tahap proses, mendokumentasikan alasan keputusan penting, dan menetapkan kewajiban menjelaskan yang dapat ditelusuri.

Transparansi, Pelaporan Pelanggaran, dan Partisipasi Publik

Transparansi sering dianggap sebagai prasyarat akuntabilitas, tetapi bukti penelitian menunjukkan hubungan yang tidak sederhana. Cucciniello dkk. (2017) menelaah 187 studi tentang transparansi pemerintah yang terbit antara 1990 dan 2015 dan mengidentifikasi enam jenis transparansi serta sembilan hasil yang dikaitkan dengannya. Mereka menyimpulkan bahwa kondisi kontekstual membentuk hasil transparansi, sehingga keterbukaan informasi tidak otomatis menghasilkan peningkatan akuntabilitas atau kepercayaan. Dengan kata lain, informasi yang dibuka harus dapat diakses, dapat dipahami, relevan, dan terhubung dengan forum yang mampu menindaklanjutinya. Transparansi yang hanya berupa tumpukan dokumen sulit menjadi dasar penagihan pertanggungjawaban.

Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) merupakan saluran akuntabilitas dari dalam organisasi. Culiberg dan Mihelič (2017) menelusuri perkembangan studi tentang pelaporan pelanggaran dan menunjukkan bahwa keputusan untuk melapor dipengaruhi oleh faktor individu, organisasi, dan situasi. Temuan ini berimplikasi bahwa dorongan moral individu saja tidak cukup. Kanal pelaporan yang aman, perlindungan terhadap pembalasan, dan penanganan laporan yang kredibel menentukan apakah pelanggaran yang diketahui orang dalam benar-benar sampai ke forum yang berwenang.

Partisipasi publik memperluas forum akuntabilitas melampaui lembaga formal. Dalam kerangka Bovens (2007), forum sosial, seperti warga, organisasi masyarakat, dan media, merupakan salah satu pihak yang berhak menagih penjelasan dari penyelenggara

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

pemerintahan. Keterlibatan mereka bermakna apabila didukung informasi yang memadai, kanal pengaduan yang ditanggapi, dan kesempatan untuk memberi masukan pada tahap perancangan kebijakan, bukan hanya pada tahap evaluasi. Tanpa dukungan tersebut, partisipasi dapat menjadi formalitas yang tidak berpengaruh pada keputusan.

Tantangan Kontemporer

Tantangan pertama berkaitan dengan struktur tata kelola yang semakin terfragmentasi. Kolaborasi lintas lembaga, kontrak dengan pihak swasta, dan jaringan kebijakan memperbanyak pihak yang terlibat dalam satu layanan publik. Konsekuensinya, garis akuntabilitas menjadi kabur, sebagaimana diperingatkan Thompson (1980). Respons yang memadai bukan menambah lapisan pelaporan, melainkan memperjelas siapa yang menjawab untuk apa dan kepada siapa pada setiap rantai pelaksanaan.

Tantangan kedua adalah ritualisasi akuntabilitas. Ketika konsep akuntabilitas meluas tanpa batas (Mulgan, 2000) dan forum tidak selalu mampu atau berminat menindaklanjuti laporan yang diterima (Schillemans & Busuioc, 2015), organisasi cenderung menghasilkan laporan demi memenuhi kewajiban, bukan demi pembelajaran. Laporan yang tebal tetapi jarang dibaca menghabiskan sumber daya tanpa meningkatkan kualitas keputusan. Karena itu, perancangan sistem akuntabilitas perlu menanyakan siapa yang akan menggunakan setiap laporan dan konsekuensi apa yang mungkin timbul darinya.

Tantangan ketiga adalah tata kelola data dan algoritma. Busuioc (2021) menunjukkan bahwa sistem kecerdasan buatan yang digunakan dalam keputusan publik, mulai dari perekrutan hingga penegakan hukum, menimbulkan masalah akuntabilitas yang khas karena keputusan sistem sulit dijelaskan dan sering bergantung pada produk pihak ketiga. Untuk menjaga kemampuan pejabat memberi penjelasan kepada warga, ia menekankan pentingnya pemahaman atas cara kerja model dan pemilihan pendekatan yang dapat diinterpretasikan. Dari perspektif etika, pejabat yang mengandalkan keluaran algoritma tetap memikul tanggung jawab atas keputusan yang diambil, sehingga pengawasan manusia perlu bermakna dan bukan sekadar mengesahkan hasil mesin.

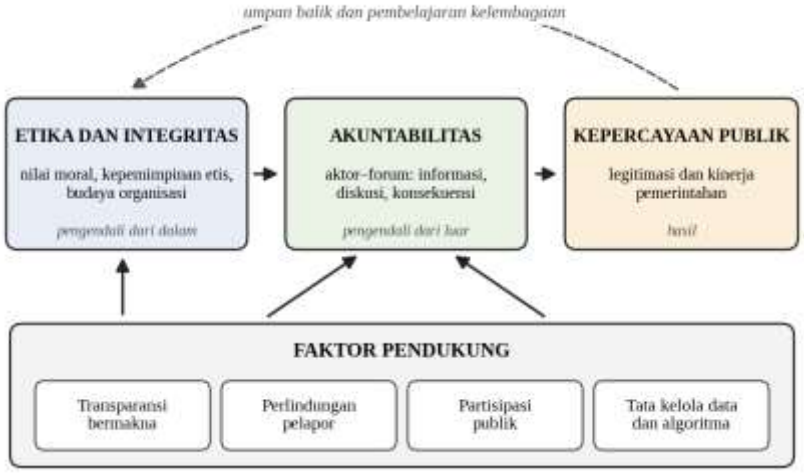
Tantangan keempat adalah korupsi yang bersifat sistemik. Rose-Ackerman dan Palifka (2016) menganalisis sebab, akibat, dan upaya reformasi korupsi dengan pendekatan ekonomi politik. Pesan umum dari kajian semacam itu adalah bahwa korupsi sulit diberantas oleh satu instrumen saja. Reformasi yang efektif perlu mengubah insentif, memperkuat lembaga

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

pengawas independen, membuka akses informasi, dan melindungi pihak yang melapor. Rekomendasi OECD (2017) yang menggabungkan aspek sistem, budaya, dan akuntabilitas selaras dengan pesan tersebut.

Kerangka Terpadu Penguatan Etika dan Akuntabilitas

Berdasarkan sintesis di atas, artikel ini mengusulkan kerangka terpadu yang disajikan pada Gambar 1. Kerangka ini menempatkan etika dan integritas sebagai pengendali dari dalam, akuntabilitas sebagai pengendali dari luar, dan kepercayaan publik sebagai hasil yang diharapkan. Etika memengaruhi cara aktor menjawab dalam hubungan akuntabilitas, sedangkan akuntabilitas memberi penegasan bahwa nilai moral akan diperhatikan dan dinilai. Hasil dari interaksi keduanya, berupa keputusan dan layanan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, memengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik. Kepercayaan itu kemudian menjadi umpan balik yang menguatkan komitmen organisasi untuk belajar dan memperbaiki diri.



Gambar 1. Kerangka Terpadu Etika dan Akuntabilitas Publik

Sumber: Sintesis penulis dari Bovens (2007), Huberts (2018), Overman dan Schillemans (2022), dan OECD (2017)

Faktor pendukung dalam kerangka ini bekerja pada kedua sisi. Transparansi yang bermakna menyediakan informasi bagi forum penagih (Cucciniello dkk., 2017). Perlindungan pelapor menjamin bahwa pengetahuan orang dalam dapat mencapai forum yang berwenang (Culiberg & Mihelič, 2017). Partisipasi publik memperluas jangkauan forum sosial (Bovens, 2007). Tata kelola data dan algoritma menjaga agar digitalisasi tidak mengurangi kemampuan organisasi untuk menjelaskan keputusannya (Busuioc, 2021). Tanpa faktor pendukung, etika dan akuntabilitas cenderung berjalan sebagai tuntutan normatif yang tidak memiliki sarana

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

pelaksanaan.

Agar kerangka dapat diterapkan, strategi penguatan perlu dibedakan menurut tingkatannya. Tabel 2 merangkum strategi pada tingkat individu, organisasi, dan sistem. Pembagian ini sejalan dengan pendekatan OECD (2017) yang menekankan sistem integritas yang koheren, budaya integritas, dan akuntabilitas yang efektif.

Tabel 2. Strategi Penguatan Etika dan Akuntabilitas menurut Tingkatan

Tingkat	Penguatan etika	Penguatan akuntabilitas
Individu	Rekrutmen berbasis nilai, pelatihan berbasis dilema etis, penguatan motivasi pelayanan publik	Kejelasan siapa yang menagih dan atas hal apa, sehingga rasa dimintai pertanggungjawaban (*felt accountability*) tumbuh
Organisasi	Kepemimpinan etis yang konsisten, kebijakan konflik kepentingan, budaya yang aman untuk menyuarakan keberatan	Pemetaan pemilik keputusan, dokumentasi alasan keputusan, kanal pelaporan pelanggaran yang aman dan ditindaklanjuti
Sistem	Kode etik yang ditegakkan, lembaga etik dan integritas yang independen, pendidikan etika berkelanjutan	Pengawasan dan audit independen, keterbukaan informasi yang bermakna, partisipasi publik, tata kelola data dan algoritma

Sumber: Sintesis penulis dari OECD (2017), Overman dan Schillemans (2022), serta Shakeel dan Van Thiel (2020)

Secara praktis, kerangka ini mengarahkan perhatian pada tiga prinsip rancangan. Pertama, kepatuhan formal harus dilengkapi dengan penguatan nilai, karena sistem yang hanya mengandalkan aturan cenderung melahirkan perilaku mencari celah. Kedua, setiap mekanisme akuntabilitas harus memiliki forum yang jelas dan konsekuensi yang nyata, karena pelaporan tanpa tindak lanjut hanya menambah beban administratif. Ketiga, evaluasi atas sistem integritas harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pihak luar, agar organisasi tidak menilai dirinya sendiri. Ketiga prinsip tersebut bersifat umum dan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pemerintahan.

Beberapa keterbatasan perlu dicatat. Kerangka yang diusulkan bersumber dari sintesis konseptual sehingga belum diuji secara empiris. Sebagian besar literatur yang dirujuk berasal dari konteks dan tradisi administrasi publik tertentu, sehingga penerapannya pada konteks lain memerlukan penyesuaian. Selain itu, hubungan antarelemen dalam kerangka, misalnya seberapa besar pengaruh kepemimpinan etis terhadap perasaan dimintai pertanggungjawaban, belum dapat diukur dari kajian ini. Penelitian lanjutan dapat menggunakan studi kasus komparatif, survei lintas organisasi, atau eksperimen untuk menguji proposisi yang diturunkan dari kerangka.

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

SIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa etika dan akuntabilitas publik merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Etika menyediakan orientasi moral dari dalam diri penyelenggara, sedangkan akuntabilitas menyediakan pengawasan, penilaian, dan konsekuensi dari luar. Hubungan keduanya dijembatani oleh rasa dimintai pertanggungjawaban, yaitu keyakinan pelaku bahwa tindakannya akan dinilai oleh forum yang legitim. Akuntabilitas yang kuat tanpa dasar etika mendorong kepatuhan yang dangkal, sedangkan etika tanpa akuntabilitas rentan terhadap rasionalisasi dan konflik kepentingan.

Efektivitas kedua unsur itu bergantung pada kepemimpinan etis, budaya integritas, transparansi yang bermakna, perlindungan pelapor pelanggaran, dan partisipasi publik. Tantangan kontemporer yang perlu diantisipasi meliputi masalah banyak tangan pada struktur tata kelola yang terfragmentasi, ritualisasi pelaporan, opasitas sistem algoritmik, dan korupsi sistemik. Kerangka terpadu yang dirumuskan dalam kajian ini menempatkan etika, akuntabilitas, dan faktor pendukung dalam satu siklus yang bermuara pada kepercayaan publik dan kembali memperkuat pembelajaran kelembagaan.

Bagi pembuat kebijakan, disarankan agar sistem integritas dirancang secara menyeluruh dengan menggabungkan aturan, lembaga pengawas independen, dan pembangunan budaya, serta memastikan bahwa setiap kewajiban pelaporan memiliki forum yang jelas dan konsekuensi yang nyata. Bagi pimpinan organisasi publik, disarankan agar kepemimpinan etis diwujudkan melalui keteladanan, kanal pelaporan yang aman, dan pemetaan tanggung jawab keputusan, termasuk keputusan yang melibatkan sistem digital. Bagi peneliti, disarankan agar kerangka ini diuji secara empiris pada berbagai konteks pemerintahan dengan metode kuantitatif, kualitatif, maupun eksperimental, serta dikembangkan lebih lanjut pada isu akuntabilitas algoritmik yang masih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Aleksovska, M., Schillemans, T., & Grimmelikhuijsen, S. (2019). Lessons from five decades of experimental and behavioral research on accountability: A systematic literature review. *Journal of Behavioral Public Administration, 2*(2). https://doi.org/10.30636/jbpa.22.66

Aslim, A. D. A., Amalya, A. A., & Ayuni, N. (2026). Whistleblowing System Sebagai Instrumen Etika dan Akuntabilitas Publik di Sektor Pemerintahan: Sebuah Systematic Literature Review. Indonesian Journal of Public Administration Review, 3(2), 15.

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

https://doi.org/10.47134/par.v3i2.5545

Aslim, A. D. A., Ayuni, N., & Amalya, A. A. (2026). Etika Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Administrasi Publik : Telaah Perkembangan dan Tantangannya. Public Insoiration: Jurnal Administrasi Publik, 11(2025), 1–8.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Busuioc, M. (2021). Accountable artificial intelligence: Holding algorithms to account. *Public Administration Review, 81*(5), 825–836. https://doi.org/10.1111/puar.13293

Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review, 77*(1), 32–44. https://doi.org/10.1111/puar.12685

Culiberg, B., & Mihelič, K. K. (2017). The evolution of whistleblowing studies: A critical review and research agenda. *Journal of Business Ethics, 146*(4), 787–803. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3237-0

Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and why it is important. *Public Integrity, 20*(sup1), S18–S32. https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404

Lee, E., Lewis-Liu, T., Khurana, S., & Lu, M. (2024). A systematic review of the link between public service motivation and ethical outcomes. *Asia Pacific Journal of Public Administration, 46*(3), 236–263.

Mulgan, R. (2000). 'Accountability': An ever-expanding concept? *Public Administration, 78*(3), 555–573.

Mustafa, D., Niswaty, R., Aslim, A. D. A., Amalya, A. A., Haerul, Djohar, Afrisal, A. F., Rusliadi, Rudi, Atmansyah, L., Azmi, I. F., Takdir, M., Fitri, A., & Mahsyar, A. (2026). Etika dan Akuntabilitas Publik: Menjawab Krisis Integritas Birokrasi (Kasmiah (ed.); Pertama). ASHA Publishing.

OECD. (2017). *Recommendation of the Council on public integrity*. OECD Publishing.

Overman, S., & Schillemans, T. (2022). Toward a public administration theory of felt accountability. *Public Administration Review, 82*(1), 12–22. https://doi.org/10.1111/puar.13417

Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review, 47*(3), 227–238.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Schillemans, T., & Busuioc, M. (2015). Predicting public sector accountability: From agency drift to forum drift. *Journal of Public Administration Research and Theory, 25*(1), 191–215. https://doi.org/10.1093/jopart/muu024

Shakeel, F., & Van Thiel, S. (2020). Ethical leadership: A structured review into construct, measurement, public sector context and effects. *International Journal of Public*

Licensed under (cc) BY-NC a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)

Leadership, 16(1). https://doi.org/10.1108/IJPL-09-2019-0060

Thompson, D. F. (1980). Moral responsibility of public officials: The problem of many hands. *American Political Science Review, 74*(4), 905–916.

Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index 2024*. https://www.transparency.org/en/cpi/2024

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)